

KOMUNITAS EKONOMI ASEAN: UPAYA INTEGRASI EKONOMI-EKONOMI ASEAN¹

THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: THE EFFORT OF ASEAN ECONOMIC INTEGRATION

C.P.F. Luhulima²

Pusat Penelitian Politik LIPI
(cpfluhu5@yahoo.com)

Abstrak – Komunitas Ekonomi ASEAN mulai berlaku pada 1 Januari 2016. Mekanisme untuk menjalankan KEA sudah tersusun. Kegiatan-kegiatan pun meningkat untuk memberhasilkannya. Pengukuran keberhasilan dilakukan dalam bentuk *ASEAN Economic Community Scorecard*, yang masih dipersoalkan kesahihannya. Pada tingkat nasional, Presiden RI telah mengeluarkan INPRES No 5/2008 dan INPRES No 11/2011 untuk memacu pemerintah Indonesia untuk menggiatkan persiapan ke arah perwujudan KEA. Masih banyak yang masih harus dikerjakan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing, juga di bidang tenaga kerja terdidik dan terlatih. Demikian pula peningkatan kesadaran umum masyarakat Indonesia akan pemberlakuan KEA, yang memang belum melebar ke tingkat UKM. Masalah yang muncul ialah bagaimana perwujudan KEA berpadu dengan Indonesia Vision 2025 dengan pembangunan koridor ekonominya.

Kata kunci: ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA), INPRES, Indonesia Vision 2025

Abstract – ASEAN's Economic Community will start on January 1, 2016. The mechanism to administer the AEC is in place. Activities are intensifying to make the endeavour successful. Its successes are measured by the *ASEAN Economic Community Scorecard*, the validity of which is questioned by researchers and practitioners. At the national level, Indonesia's president has issued two presidential instructions, No 5/2008 and No 11/2011, to the bureaucracy to speed up socialisation of the programme. A great number of actions will still have to be accomplished, also in the field of mutually recognised trained manpower and professionals. The same also applies to socialisation of the concept to broad sections of society, particularly small and medium-scale enterprises. Another problem is the harmonisation of AEC with Indonesia Vision 2025 with the construction of its economic corridors.

Keywords: ASEAN, ASEAN Economic Community, INPRES, Indonesia Vision 2025

¹ Artikel ini pernah disampaikan dalam Policy Brief untuk Eselon 1, Lembaga Administrasi Negara tentang "Kesiapan Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Jakarta, 15 Agustus 2015.

² Penulis adalah Peneliti Ahli di Pusat Penelitian Politik, LIPI.

Pendahuluan

Pada KTT 2003 di Bali para pemimpin ASEAN setuju untuk mengintegrasikan ekonomi-ekonomi mereka dan membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN (KEA) di tahun 2020. KEA merupakan salah satu dari tiga komunitas, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, yang membentuk Komunitas ASEAN sebagaimana dideklarasikan para pemimpin ASEAN dalam *ASEAN Concord II* (lebih dikenal sebagai *Bali Concord II*). Pada KTT ASEAN yang diadakan di Cebu, Filipina pada Januari 2007, batas waktu perwujudan AEC, bersama-sama dengan dua Komunitas lainnya, dimajukan menjadi 2015.

Tujuan akhir KEA adalah pembentukan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih. Walaupun pendekatan untuk meraih tujuan akhir ini tidak dinyatakan dalam *Bali Concord II*, yang jelas adalah kebutuhan untuk meraih derajat integrasi ekonomi regional dan pengembangan kelembagaan untuk meraih integrasi itu.

Kerjasama ekonomi ASEAN tidaklah mulai dengan KEA. Sejak pembentukan ASEAN, kerjasama ekonomi merupakan dasar pembentukan ASEAN seperti dapat kita lihat pada gambar di bawah:³

³ Dr. Jean-Pierre Verbiest, "ASEAN 2030: Aspirations, Enjeux et Politique", *Colloque CERI*, Paris, 16 Novembre 2015, hlm. 5

Gambar 1

Milestones of ASEAN Economic Cooperation

Figure 1.1. Milestones of ASEAN Economic Cooperation



Sumber: Dr. Jean-Pierre Verbiest, “ASEAN 2030: Aspirations, Enjeux et Politique”, Colloque CERI, Paris, 16 November 2015, hlm. 5.

ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), ASEAN Framework Agreement of Service (AFAS), ASEAN Investment Agreement (AIA) sudah mendahului Komunitas Ekonomi itu dan merupakan komponen-komponen utamanya. Di samping itu, ASEAN sudah pula mempunyai FTA’s dengan berbagai mitra dagangnya, seperti dapat dilihat dari tabel berikut:⁴

⁴ Arsenio M. Balisacan, “ASEAN Economic Integration 2015: A Window to Global Competitiveness”, Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, dalam <http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27> Maret 2014 – TSIS-draft_MD_PRD.pdf.

Tabel 1

ASEAN Bilateral FTAs: Agenda

	ASEAN FTA	ASEAN-China FTA	ASEAN-Korea FTA	ASEAN-Japan comprehensive economic partnership	ASEAN-India FTA	ASEAN-Australia/NZ FTA
Entry into force	1993	2005	2007	2008	2010	2010
Market size (million)	599	1,939	647	726	1,814	625
Econ size (US\$, trillion)	1.9	7.7	2.9	7.3	3.4	3.2
Coverage	Goods Services Investment	Goods Services Investment	Goods Services Investment	Goods, Services, Investment ASEAN wide-under negotiation	Goods, Services, Investment negotiations completed; to be signed	Goods Services Investment
Duty phase out date (A6+DP/CLMV)	2010/2015 (2018)	2012 2018	2012 2016/2017 (THA) 2018 (VNM) 2020 (CLM)	2018 2021 (CLM)	2016 2019 (PHL) 2021 (CLMV)	2020 2022 (VNM) 2025 (ICLM)
ROO	40% or CTH PSRs	40% Limited PSRs	40% or CTH PSRs	40% or CTH PSRs	35% CTH PSRs	40% or CTH PSRs
Total trade (US\$, billion)	519.8	751.8	618.4	726.4	575.2	582.6

Source: Pillai, 2013.

Sumber: Sanjay Kalra, *ASEAN Economic Community: Progress and Global Perspective*, University of Economics and Business, (Vietnam: Vietnam National University), 11 Oktober 2013, hlm. 23

Lalu, mengapa membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN? Dan, bagaimana hubungan wilayah-wilayah perdagangan bebas ini dengan Komunitas ASEAN? Kehilangan daya saing ekonomi dibandingkan dengan pasar-pasar baru seperti RRT merupakan kekuatan dorong utama menuju upaya ASEAN untuk mempercepat integrasi ekonomi.

Pada KTT ASEAN di Phnom Penh di bulan November 2002, Perdana Menteri Goh Chok Tong mengusulkan supaya ASEAN mencanangkan suatu ekonomi yang terintegrasi, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN. Usul Goh Chock Tong dimotivasi oleh dua hal: pertama, meyakinkan sektor bisnis internasional dan masyarakat umum bahwa ASEAN sungguh-sungguh berniat untuk mengintegrasikan ekonomi regional dalam bentuk yang lebih dalam dari pada wilayah perdagangan bebas. Istilah ini mengikuti Komunitas Ekonomi Eropa, suatu tatanan yang paling mendalam dan paling maju – dan *intrusive* – dari semua skema semacam ini. Kedua, adalah untuk menyampaikan bahwa pengertian pembangunan komunitas di ASEAN mencakup pula dimensi keamanan dan kemudian

politik serta sosial-budaya dan membangkitkan pengertian tentang identitas Asia Tenggara.⁵

Memang ada motivasi ekonomi yang kuat bagi ASEAN untuk meningkatkan peringkatnya dengan membentuk Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN, Komunitas Sosial-Budaya ASEAN dan Komunitas Ekonomi ASEAN, yang akan merupakan ketiga pilar dari Komunitas ASEAN pada 2015.

Pada 2003, prinsip dasar dari menurunkan tarif atas barang yang diperdagangkan antarnegara ASEAN dikembangkan lebih lanjut dalam konsep KEA, yang bertujuan *menciptakan suatu pasar dan landasan produksi tunggal, suatu wilayah ekonomi yang sangat kompetitif, suatu wilayah dengan pembangunan ekonomi yang equitable dan suatu wilayah yang sepenuhnya diintegrasikan ke dalam ekonomi global.*

Komunitas Ekonomi ASEAN

Gambar 2

ASEAN Economic Community 2015



Sumber: Arsenio M. Balisacan, "ASEAN Economic Integration 2015: A Window to Global Competitiveness", Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, dalam [http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27 March 2014 – TSIS-draft_MD_PRD.pdf](http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27-March-2014-TSIS-draft_MD_PRD.pdf).

⁵ Sanchita Basu Das, et. al., *The ASEAN Economic Community: A Work in Progress*, (Singapore: Asian Development Bank & Institute of Southeast Asian Studies, 2013).

Secara spesifik, masing-masing pilar dari Komunitas Ekonomi ASEAN berisikan:

Pilar 1: Pasar Tunggal dan Landasan Produksi, yang berisikan

- Arus bebas barang
- Arus bebas jasa
- Arus modal yang lebih bebas
- Arus bebas tenaga kerja terlatih
- Sektor Integrasi Prioritas (*Priority Integration Sectors*)
- Pangan, Pertanian dan Kehutanan

Sektor Integrasi Prioritas (SIP) dengan negara anggota yang mengkoordinasinya dapat dilihat dalam tabel di bawah:

Tabel 2. Sektor Integrasi Prioritas

No	Priority Integration Sector	Coordinating Country	No	Priority Integration Sector	Coordinating Country
1	Agro-based product	Myanmar	7	Healthcare	Singapore
2	Air travel	Thailand	8	Rubber-based product	Malaysia
3	Automotives	Indonesia	9	Textile & apparels	Malaysia
4	e-ASEAN	Singapore	10	Tourism	Thailand
5	Electronics	Filipina	11	Wood-based products	Indonesia
6	Fisheries	Myanmar	12	Logistics	Vietnam

Sumber: Arsenio M. Balisacan, "ASEAN Economic Integration 2015: A Window to Global Competitiveness", Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, dalam [http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27 Maret 2014 – TSIS-draft_MD_PRD.pdf](http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27%20Maret%202014-TSIS-draft_MD_PRD.pdf).

Pilar 2: Wilayah Ekonomi yang kompetitif

- Kebijakan Persaingan
- Perlindungan Konsumen
- *Intellectual Property Rights*
- Pengembangan Infrastruktur
- Perpajakan
- *E-commerce*

Pilar 3: *Equitable Economic Development*

- Pengembangan UKM
- Inisiatif bagi Integrasi ASEAN

Pilar 4: Integrasi dengan Ekonomi Global

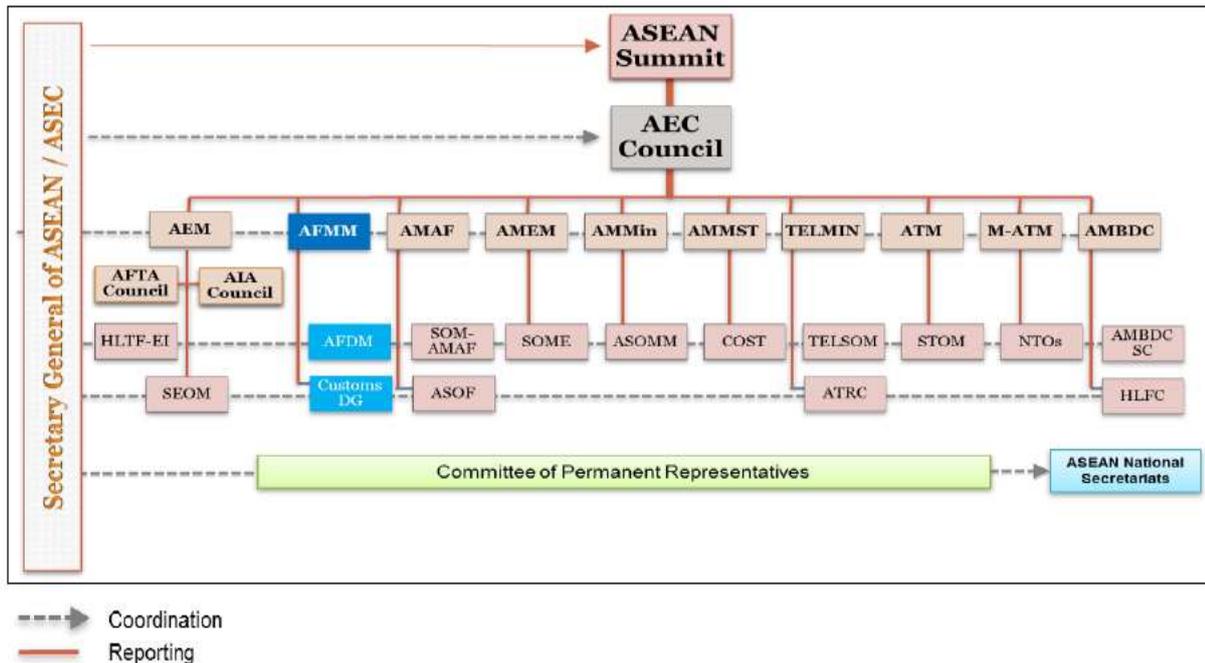
- Pendekatan Terpadu menuju Hubungan Ekonomi Eksternal
- Partisipasi yang lebih besar dalam jejaring suplai global

Mekanisme yang menata dan menjalankan Komunitas Ekonomi ASEAN dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dewan AEC membawahi Menteri-menteri Ekonomi ASEAN, menteri-menteri keuangan, energi dan mineral, kehutanan dan ilmu pengetahuan dan teknologi, telekomunikasi dan teknologi informasi, transportasi, pariwisata, dan *Mekong Basin Development Cooperation*. Sekretariat ASEAN menghadiri masing-masing sidang menteri dan sidang pejabat senior kementeriannya sebagai pelapor hasil sidang-sidang mereka.

Fungsi Sekretariat ASEAN adalah “*to provide for greater efficiency in the coordination of ASEAN organs and for more effective implementation of ASEAN projects and activities.*” “*initiate, facilitate and coordinate ASEAN stakeholder collaboration in realising the purposes and principles of ASEAN as reflected in the ASEAN Charter.*”⁶ Tetapi, seberapa jauh tingkat koordinasi itu dilakukan bergantung kepada sidang-sidang menterinya. Di dalam lingkungan kerja menteri-menteri ekonomi, peran koordinasi Sekretariat ASEAN lebih besar dibandingkan dengan di lingkungan kerja menteri-menteri luar negeri.

⁶ASEAN Secretariat Website, <http://www.asean.org/asean/asean-secretariat>.

Gambar 3



Source: Badan Kebijakan Fiskal, Ministry of Finance RI

Notes: AFMM: Finance; AMAF: Forestry; AMEM: Energy; AMMin: Minerals; AMMST: Science & Technology; TELMIN: Telecom & Information Technology; ATM: Transport; M-ATM: Tourism; AMBDC: ASEAN Mekong Basin Development Cooperation.

Banyak kemajuan sudah dibuat dalam penurunan tarif karena ASEAN sudah meniadakan semua tarif pada 2010, kecuali untuk mata-mata dagang di dalam daftar *highly sensitive* dan *general exception*. Negara-negara anggota lain, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (KLMV) diharapkan akan menghapus semua tarif pada permulaan 2015.

Kemajuan ini antara lain menyebabkan bahwa pada 2013, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) ke Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand (ASEAN 5) melampaui RRT untuk pertama kali sejak 2007.⁷ Sebagian besar dari investasi itu justru datang dari RRT, yang kini merupakan investor nomor tiga terbesar di dunia. Pada 2013 itu ASEAN 5 menerima US\$128,4 milyar dalam bentuk investasi asing, suatu kenaikan sebesar 7 persen, dari US\$120 milyar pada 2012.⁸

⁷ Data Bank of America Merrill Lynch.

⁸ Sophie Song, "Southeast Asia Receives More Foreign Direct Investment (FDI) Than China, Which Is Now The World's Third-Largest Foreign Investor", 5 Maret 2014, dalam <http://www.ibtimes.com/southeast-asia-receives-more-foreign-direct-investment-fdi-china-which-now-worlds-third-largest>, diunduh pada 5 Agustus 2014.

Bank Amerika menunjuk kepada tiga kecenderungan bagi perubahan ini: pertama, demografi ASEAN yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan RRT yang penduduknya menua (dengan angkatan kerja yang menyusut); kedua, perbedaan upah yang meningkat (pertumbuhan upah yang lebih tinggi yang disebabkan oleh mata uang RMB yang lebih kuat); ketiga, pasar domestik ASEAN yang tumbuh dengan cepat. RRT juga muncul sebagai investor ke luar negeri sebagai akibat dari tabungan dan kekayaan yang terus bertumbuh.⁹

Daya saing negara-negara ASEAN secara global dan regional dapat dikategorikan sebagai berikut: Menurut *Global Competitiveness Report (CGR)* pada 2013-2014 Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 139 negara dan urutan ke-5 di ASEAN (sesudah Singapura (2), Malaysia (24), Brunei Darussalam (26), Thailand (37), dan Filipina (59)). Daya saing Indonesia ini meningkat cukup tinggi dari urutan 50 pada 2012. Pada lain pihak, *Human Development Index (HDI)* Indonesia berurut 108, di bawah Singapura (27), Brunei (37), Malaysia (57), Thailand (92), and Filipina (97).¹⁰

Apabila kita tinjau *AEC Commitment Realization Scorecard* negara-negara anggota, maka daftar di bawah ini memperlihatkan tingkat komitmen mereka. Dari 2008 sampai dengan 2013, tingkat komitmen rata-rata ialah 77,54. Indonesia sendiri berada pada tingkat 83,2, di bawah ASEAN 5, bahkan di bawah Myanmar dan Vietnam, negara-negara anggota baru. Masih banyak yang harus dilakukan Indonesia untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan KEA.

⁹ "ASEAN Finally Surpasses China In Foreign Direct Investment", 5 Maret 2014, dalam <http://www.cfoinnovation.com/story/7951/asean-finally-surpasses-china-foreign-direct-investment>, diunduh pada 5 Agustus 2014.

¹⁰ Wempi Saputra and Ari Cahyo Trilaksana, "Toward ASEAN Economic Community: Revitalising Indonesia's Position in Financial and Customs Cooperation, Center for Policy Analysis and Harmonization", Ministry of Finance, Republic of Indonesia, dalam https://www.conftool.com/irsa2014/index.php/Saputra-Towards_ASEAN_Economic_Community190.pdf?page=downloadPaper&filename=Saputra-Towards_ASEAN_Economic_Community_190.pdf&form_id=190&form_version=final, diunduh pada 5 Agustus 2014.

Tabel 3. AEC Commitment Realization Scorecard

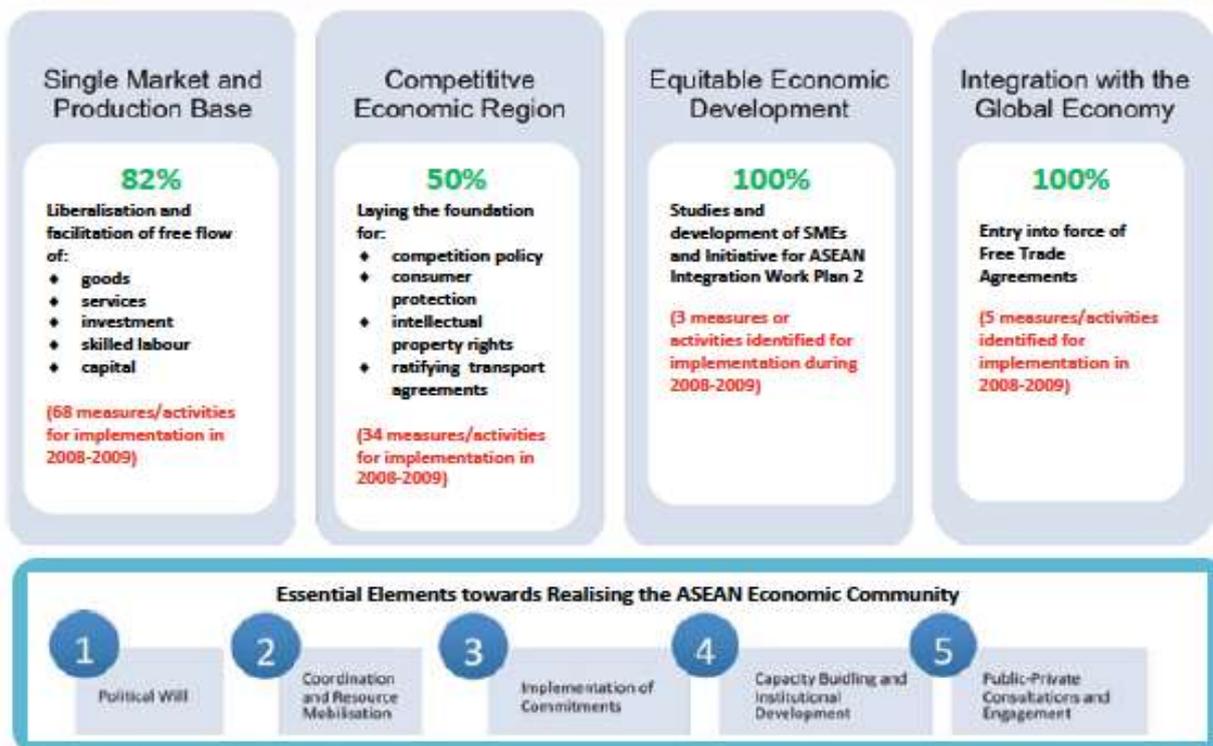
No	Country	Periods			
		2008-2009	2010-2011	2012-2013	2008-2013*
1	Brunei D	95.4	80.6	80.3	85.1
2	Cambodia	95.3	77.6	79.7	83.4
3	Indonesia	91.7	78.9	80.3	83.2
4	Lao PDR	95.3	77.8	76.8	82.9
5	Malaysia	94.5	84.5	85.1	87.4
6	Myanmar	94.4	81.4	82.9	85.7
7	Philippines	95.4	82.0	80.8	85.6
8	Singapore	96.3	85.6	84.9	88.8
9	Thailand	95.4	83.2	86.5	87.4
10	Vietnam	95.4	83.9	84.1	87.5
	ASEAN	89.5	72.12	71.88	77.54

Source: ASEAN Secretariat (2013)

Gambar 4

ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

73.6% of targets achieved



Sumber: Sanchita Basu Das, "A Critical Look at the ASEAN Economic Community Scorecard", 1 Juni 2012, *East Asia Forum*, dalam <http://www.eastasiaforum.org/2012/06/01/a-critical-look-at-the-asean-economic-community-scorecard/>.

Tetapi, bagi Sanchita Basu Das, AEC Scorecard ini, kendatipun ia menunjukkan bahwa ia penting bagi dukungan perwujudan cetak biru KEA, “ia tidak memuaskan.” Scorecard ini harus dilengkapi dengan tindakan-tindakan lain yang dapat melacak keadaan, kinerja dan dampak liberalisasi perdagangan dan investasi di ASEAN.

*The AEC Scorecard needs to be transparent, detailed and readily available for private sector use. It should be able to clearly translate an agreement’s benefits, such as those relating to reduced costs and prices in the region. These issues need more awareness and require the active participation of all those concerned in the process, including the region’s business community.*¹¹

CIMB ASEAN Research Institute dalam *findingsnya* berpendapat bahwa kendatipun KEA dan sebagian besar persetujuan untuk memfasilitasi arus barang dan jasa yang bebas, investasi intra-ASEAN, harmonisasi bea cukai, dukungan bagi UKM, “there is ample evidence to suggest that *actual implementation lags significantly behind the timelines of stated objectives.*”¹²

INPRES Nomor 5 Tahun 2008 dan INPRES Nomor 11 Tahun 2011

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 22 Mei 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008–2009 merupakan instruksi Presiden pertama yang menentukan untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing [Kementerian dan Lembaga], dalam rangka pelaksanaan Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 guna melaksanakan berbagai komitmen Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).”

Pada bulan Juni 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi Presiden RI Nomor 11 Tahun 2011 yang lebih lengkap tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menyatakan pertama, mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN “sebagaimana

¹¹ Sanchita Basu Das, “A Critical Look at the ASEAN Economic Community Scorecard”, 1 Juni 2012, East Asia Forum <http://www.eastasiaforum.org/2012/06/01/a-critical-look-at-the-asean-economic-community-scorecard/>, diunduh pada 5 Agustus 2014.

¹² “The ASEAN Economic Community: The Status of Implementation, Challenges and Bottlenecks”, CIMB ASEAN Research Institute, Juni 2013. Penekanan oleh pemakalah.

tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Instruksi Presiden ini.” Langkah-langkah yang harus diambil berpedoman pada program yang meliputi:

1. Menuju Pasar Tunggal dan Basis Produksi, yang fokus kepada:
 - a. Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC;
 - b. Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas;
 - c. Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas;
 - d. Komitmen AEC untuk Arus Investasi Secara Bebas;
 - e. Komitmen AEC untuk Arus Modal yang lebih bebas;
 - f. Priority Integration Sectors; dan
 - g. Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan.
2. Menuju Wilayah Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi, yang fokus kepada:
 - a. Kebijakan Persaingan;
 - b. Hak atas Kekayaan Intelektual;
 - c. Pengembangan Infrastruktur;
 - d. Perpajakan; dan
 - e. Perdagangan secara elektronik (e-commerce).
3. Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang, yang fokus kepada Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang mengoordinasikan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan secara berkala kepada Presiden.

Lampiran Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 ini berisikan program :

- Menuju Pasar Tunggal dan Basis Produksi:
 - Peningkatan Daya Saing dan Pemanfaatan Komitmen AEC
 - Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas
 - Komitmen AEC untuk Arus Jasa Secara Bebas
 - Komitmen AEC untuk Arus Investasi Secara Bebas
 - Komitmen AEC untuk Arus Modal yang Lebih Bebas

- Priority Integration Sectors
- Komitmen AEC untuk Perdagangan Makanan, Pertanian dan Kehutanan
- Menuju Wilayah Ekonomi yang Berdaya Saing Tinggi
 - Program
 - Kebijakan Persaingan
 - Hak atas Kekayaan Intelektual
 - Pengembangan Infrastruktur
 - Perpajakan
 - Perdagangan secara Elektronik (e-commerce)
- Menuju Kawasan dengan Pembangunan Ekonomi yang Seimbang
 - Pengembangan sektor Usaha Kecil dan Menengah

INPRES 11/2011 ditujukan kepada 21 Menteri/Sekretaris Kabinet dan 6 Kepala Badan. Kepala-kepala Badan itu ialah Sekretaris Kabinet; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Standarisasi Nasional; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. INPRES 11/2011 belum banyak berpengaruh atas pelaksanaan di lapangan.

Kinerja Indonesia

Hasil kajian Pusat Penelitian Ekonomi (P2E) LIPI atas beberapa sektor dalam *Priority Integration Sectors* menunjukkan bahwa secara umum pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi banyak persoalan dalam menghadapi KEA 2015. Dari 12 sektor prioritas aliran bebas barang, Indonesia hanya mempunyai keunggulan komparatif di enam sektor (pertanian, elektronik, perikanan, produk karet, produk berbasis karet, tekstil dan produk tekstil/TPT) dibandingkan beberapa negara anggota ASEAN lainnya. Di sektor jasa, seperti logistik dan pariwisata, Indonesia masih berada di bawah ASEAN 5, empat negara anggota ASEAN pertama dan Brunei Darussalam. Padahal, Indonesia merupakan negara koordinator bagi sektor otomotif dan *wood-based products*.

Banyak pelaku usaha, khususnya UKM, di 12 PIS, memang masih tertinggal dalam menghadapi AEC 2015. Mereka masih belum memahami substansi pasar bebas ASEAN. Perusahaan otomotif umumnya merupakan bengkel-bengkel kecil yang *non-authorised*, yang tidak punya pengetahuan dan pengertian tentang KEA dan mereka tidak melihat kemungkinan untuk *re-design* mata rantai suplai. Industri pakaian jadi lebih sadar akan keuntungan dan kerugian yang mungkin akan terjadi dengan pemberlakuan KEA dan sudah mulai mempersiapkan diri bagi pemberlakuannya. Kedua industri ini menekankan keharusan bagi pemerintah untuk mengidentifikasi kemungkinan keadaan yang akan berkembang untuk membantu mereka mempersiapkan diri bagi implementasi KEA.

Sampai kini tidak ada publikasi tentang kemajuan dalam implementasi cetak biru KEA. Sebagian besar dari studi tertujukan pada persiapan umum Indonesia bagi KEA menuju kompetisi global. Tidak ada studi yang meneliti kesiapan dan persiapan untuk suatu industri tertentu bagi perwujudan KEA, khususnya mata rantai suplai industri (*supply chain*), yang mencakup masalah lokasi, peran fasilitas dan penggunaan *outsourcing*. *“It is important to assess to what extent the players in the industry understands the potential benefits and loss of AEC implementation.”*¹³

KADIN sebenarnya sudah memiliki program pendampingan untuk dua sektor, yaitu SMEs dan *start-ups*, yaitu *Business Support Desk* (BSD) yang diperuntukkan untuk anggota dan dirasa perlu semakin digencarkan. Pemerintah juga punya program-program yang mendukung perkembangan SMEs. Hanya saja, pemerintah juga perlu berbenah demi menunjang persiapan seluruh elemen masyarakat terutama permasalahan klasik, yaitu infrastruktur, yang sejak dulu selalu menghantui. Apabila pembangunan infrastruktur semakin merata maka hambatan bagi industri-industri lain untuk berkembang akan dikurangi, seperti industri perkapalan demi menunjang kemaritiman Indonesia.

Tiga aspek mendasar dari kelambanan Indonesia adalah pertama, sosialisasi INPRES Pelaksanaan Kebijakan Komitmen Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN Nomor 11/2011 dengan berbagai Program dan Komitmen Pemerintah RI; kedua, dukungan atas

¹³ Mahendrawathi ER, Anisah Herdiyanti dan Hanim Maria Astuti, “Readiness of Indonesian Companies for ASEAN Economic Community (AEC) - Preliminary Findings from Automotive and Garment Industry”, *Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, Bali, Indonesia, 7 – 9 Januari 2014, dalam <http://ieom.org/ieom2014/pdfs/460.pdf>, diunduh 4 Agustus 2014.

tindakan-tindakan Pelaksanaan Program dalam INPRES 11/2011; dan ketiga, permasalahan klasik, yaitu dukungan infrastruktur.

Di bidang tenaga kerja, cetak biru AEC telah menyepakati kebebasan mobilitas tenaga kerja terampil di ASEAN melalui serangkaian tahapan yang disepakati dalam *ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)* 1995. Tahapan-tahapan itu dibicarakan dua tahun sekali dalam forum koordinasi dan persiapan liberalisasi jasa di ASEAN. Liberalisasi jasa di empat sektor prioritas, yakni perhubungan udara, e-ASEAN, kesehatan, dan pariwisata, dijadwalkan untuk 2010 dan jasa logistik untuk 2013. Liberalisasi bidang jasa secara keseluruhan diupayakan selesai pada 2015.

Komitmen Indonesia bagi liberalisasi jasa tercantum dalam *Schedule of Specific Commitment* pada pertemuan AFAS paket ke-6 tahun 2007 yang mencakup jasa bisnis (jasa profesi seperti insinyur, akuntan, jasa legal, arsitek, konsultan manajemen, dan jasa penyewaan), jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa distribusi, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan perhotelan, jasa teknologi dan informasi, jasa energi, dan jasa periklanan. Untuk memfasilitasi liberalisasi jasa dan mempermudah mobilisasi tenaga kerja profesional lintas negara ASEAN, maka perlu ada kesepakatan pengakuan tenaga profesional di bidang jasa dalam nota saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangements/MRAs*). Sejauh ini nota saling pengakuan sudah dilakukan untuk jasa arsitektur, jasa akuntansi, kualifikasi survei, praktisi medis pada 2008, dan praktisi gigi pada 2009.

Tetapi, rendahnya tingkat pendidikan dari 72% tenaga kerja Indonesia mengakibatkan sulitnya bagi kelompok masyarakat itu untuk mendapatkan pekerjaan formal dengan tingkat keterjaminan yang lebih baik. Hanya sebagian kecil (8%) dari komposisi tenaga kerja Indonesia yang mempunyai daya saing, 3% di antaranya merupakan tenaga profesional dengan tingkat pendidikan minimal sarjana, sedangkan 5% di antaranya merupakan tenaga kerja setengah terampil dengan pendidikan diploma dan kejuruan. Gambaran ini tentunya cukup mengganggu dalam menyongsong pasar tunggal ASEAN ketika liberalisasi jasa, termasuk jasa profesi baik *skilled labourers* maupun *semi-skilled labourers* akan semakin deras menjelang 2015. Tugas pemerintah dan para pemangku kepentingan ialah mempersiapkan sumber daya manusia terlatih dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi linear dengan pembangunan manusia.

Akses ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, gizi, dan fasilitas publik lainnya akan menentukan kualitas manusia dan tenaga kerja Indonesia.¹⁴

Dalam *Logistics Performance Index (LPI)* Bank Dunia tahun 2014, Indonesia tercatat sebagai urutan 53 dengan score 3,08, sedangkan Singapura di urutan (5) dengan score (4,00), Malaysia (25) dengan (3,59), Thailand (35) dengan (3,43), Vietnam (48) dengan (3,15) dan Filipina (57) dengan (3,00). Dalam infrastruktur Indonesia berada pada tingkat 2,92, Filipina 2,60, Singapura 4,28, Malaysia 3,56, Thailand 3,40 dan Vietnam 3,11.

Dalam *Travel and Tourism Competitive Index* 2013 yang dikeluarkan *World Economic Forum*, Indonesia bertingkat 70 dengan score 4,03, sedangkan Singapura bertingkat 10 dengan score 5,23, Malaysia 34 dan 4,70, Thailand 43 dan 4,47, Filipina 82 dan 3,93, sedangkan Vietnam dengan 80 dan 3,95.¹⁵ Dalam kedua indeks ini Indonesia masih berada dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan bahkan Vietnam.

Kesadaran Umum akan KEA

Pada umumnya, pengetahuan dan persepsi tentang keuntungan suatu FTA berkaitan erat dengan besarnya suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan cenderung mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang FTA yang ada, dan pada umumnya lebih optimis daripada perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Hal ini juga berlaku bagi KEA.¹⁶ Perusahaan-perusahaan yang lebih besar melihat perwujudan KEA sebagai suatu kesempatan untuk memperluas pasar mereka. *“In contrast, small and medium scale enterprises tend to be less efficient and less competitive than the larger companies.”* Penemuan JETRO (*Japan External Trade Organization*) pada 2010 menyatakan bahwa *“lack of awareness of FTAs is the most common reason for non utilization of FTAs among small and medium enterprises.”*¹⁷

¹⁴ “ASEAN Economic Community 2015: Peluang Atau Tantangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia”, dalam <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/berita-aec.pdf>, diunduh pada 2 Agustus 2014.

¹⁵ Lihat <http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness>, diunduh pada 4 Juli 2014.

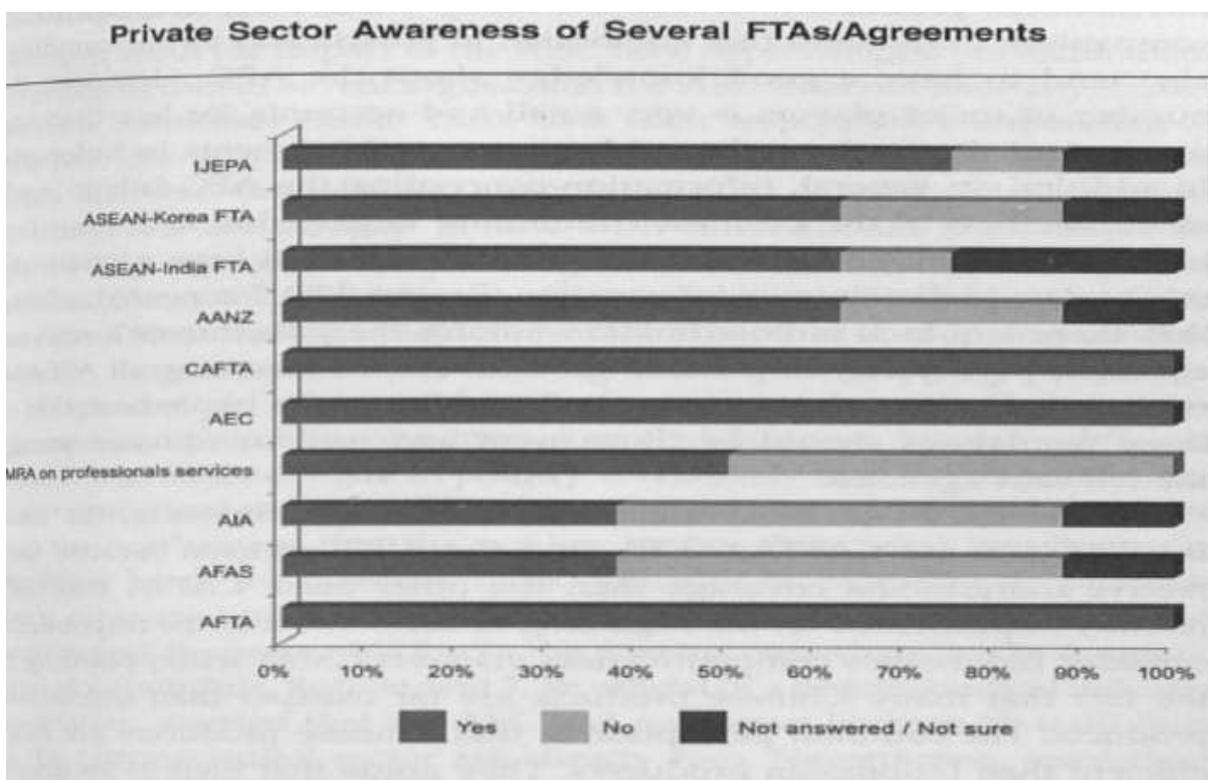
¹⁶ Widdi Mugijayani and Pratiwi Kartika, “Perspective of the Indonesian Business Sector on the Regional Integration Process,” dalam Sanchita Basu Das, (ed.), *Achieving ASEAN Economic Community 2015. Challenges for Member Countries & Business*, (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2012), hlm.210.

¹⁷ *Ibid.*

Studi JETRO ini juga mencatat bahwa pada umumnya perusahaan-perusahaan di bidang teknologi informasi tidak memanfaatkan tarif preferensial FTAs, karena tarif impor ditiadakan melalui skema-skema lain. Demikian pula halnya dengan perusahaan-perusahaan dalam industri peralatan listrik karena pada umumnya tarif pada destinasi ekspor mereka tidak diberlakukan. Pada lain pihak, sejumlah perusahaan di bidang mobil, peralatan mobil dan “transportation machinery” mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan “rules of origin.”¹⁸

Kesadaran sektor swasta akan berbagai wilayah perdagangan bebas dan perjanjian dapat dilihat di tabel di bawah ini:¹⁹

Tabel 4



Sumber: Widdi Mugijayani and Pratiwi Kartika, “Perspective of the Indonesian Business Sector on the Regional Integration Process,” dalam Sanchita Basu Das, (ed.), *Achieving ASEAN Economic Community 2015. Challenges for Member Countries & Business*, (Singapore: Institute of South East Asian Studies, 2012), hlm.211.

Kesadaran sektor swasta akan Wilayah Perdagangan Bebas ASEAN dan RRT serta KEA dan AFTA adalah 100 persen. Untuk WPB yang lain pengetahuan mereka bervariasi.

¹⁸ *Ibid.*

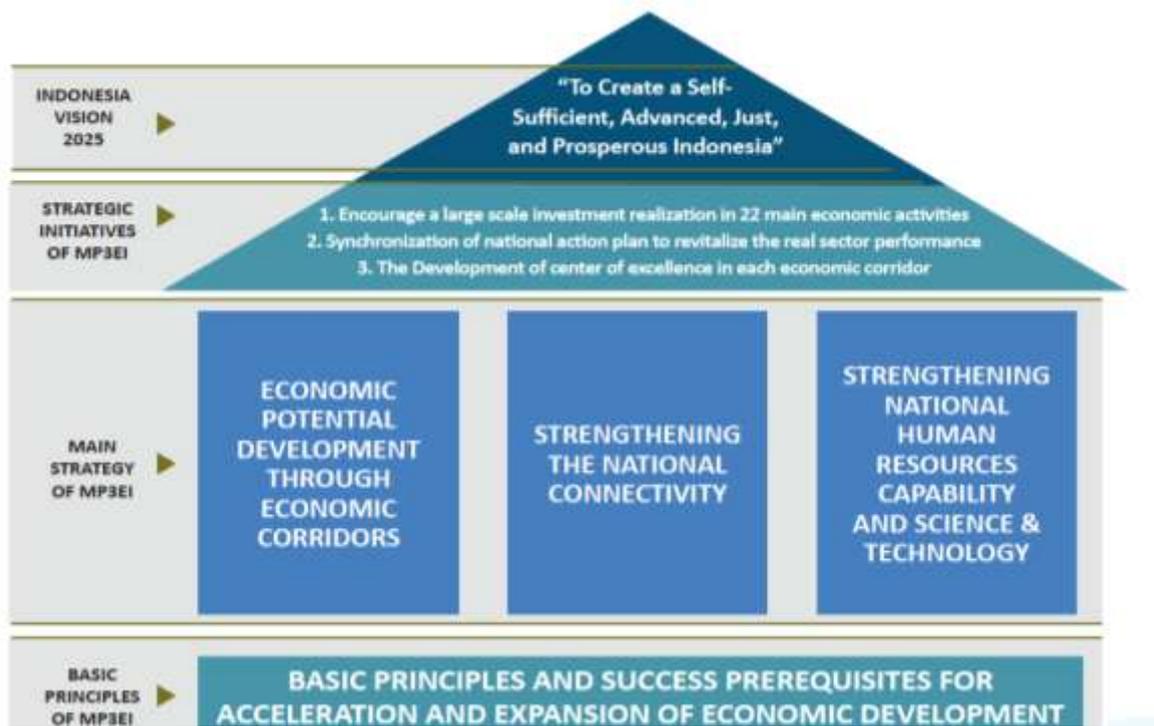
¹⁹ *Ibid.*, hlm. 211.

Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Jakarta dan sekitarnya cenderung mempunyai pengetahuan yang baik tentang KEA. Tetapi jumlah mereka sangatlah kecil, kurang dari 1 persen dari keseluruhan jumlah perusahaan di Indonesia. Lagi pula, secara umum, keterangan tentang KEA tidak sampai kepada sebagian besar dari komunitas bisnis karena baik pemerintah dan ASEAN Secretariat tidak mempunyai mekanisme untuk mendesiminasikan informasi secara sistematis dan berkelanjutan.²⁰

Indonesia Vision 2025

Pertanyaan yang harus dikemukakan di sini ialah bagaimana perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN ini yang mulai berjalan pada 1 Januari 2016 berpadu dengan Indonesia Vision 2025 dan Pembangunan *Economic Corridors Indonesia Vision 2025*.

Gambar 5



Sumber: *Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development*, Jakarta: BAPPENAS.

Bagian penting dari MP3EI adalah pembangunan koridor ekonomi yang didasarkan pada potensi dan keuntungan setiap wilayah di Indonesia. Dengan memperhatikan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

potensi dan peran strategis dari setiap pulau utama, enam koridor ekonomi diidentifikasi:

- **Sumatra** - Center for production and processing of natural resources and the nation's energy reserves;
- **Java** - Driver for national industry and service provision;
- **Kalimantan** - Center for production and processing of national mining and energy reserves;
- **Sulawesi** - Center for production and processing of national agricultural, plantation, fishery, oil & gas, and mining;
- **Bali-Nusa Tenggara** - Gateway for tourism and national food support
- **Papua-Moluccas** - Center for development of food, fisheries, energy, and national mining.

Apakah perwujudan KEA di Indonesia harus berorientasi pada *Indonesia Vision 2025* ini ataukah sebaliknya, bahwa *Indonesia Vision 2025* harus berorientasi pada KEA? Tidak ada catatan pada INPRES Nomor 11 Tahun 2011 tentang hal ini. Di sinilah terletak masalah klasik dalam kerja sama ASEAN: keputusan-keputusan yang diambil pada tingkat regional tidak diintegrasikan dengan keputusan-keputusan pembangunan ekonomi dalam negeri.

Regional Comprehensive Economic Partnership dan Trans-Pacific Partnership

Bagi sebagian ahli ekonomi, Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan ajang latihan bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lain untuk menghadapi persaingan ekonomi yang lebih ketat dalam bingkai “new regional trading architecture.” Dua arsitektur perdagangan regional itu adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan *Trans-Pacific Partnership* (TPP).

RCEP merupakan suatu persetujuan perdagangan bebas (FTA) (“an ASEAN-centred proposal for a regional free trade area”) antara sepuluh negara anggota ASEAN dan enam negara yang mempunyai FTA dengan ASEAN, yaitu Australia, India, Jepang, Korea, RRT dan Selandia Baru. RCEP secara resmi diluncurkan pada KTT ASEAN di Kamboja pada November 2012. Sasaran negosiasi RCEP adalah meraih suatu perjanjian kemitraan ekonomi yang “berkualitas tinggi dan saling menguntungkan,” yang mencakup

perdagangan barang, jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknik, hak pemilikan intelektual, persaingan, penyelesaian sengketa dan masalah-masalah lain.²¹ Putaran negosiasi ke lima diadakan di Singapura 21-27 Juni 2014. Negosiasi ke enam akan diadakan di New Delhi, 1-5 Desember 2014.

Pada lain pihak *Trans-Pacific Partnership* (TPP) bukan suatu inisiatif ASEAN. Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas yang dirundingkan oleh duabelas negara di Asia-Pasifik (Amerika Serikat, Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Mexico, Peru, Selandia Baru, Singapura dan Vietnam). Persetujuan ini mulai pada 2005 sebagai *Trans-Pacific Strategic Partnership Agreement* (TPSEP atau P4). Para negara anggota berencana untuk selesaikan negosiasi pada 2012, tetapi masalah-masalah seperti pertanian, hak kepemilikan intelektual, jasa dan investasi menyebabkan negosiasi berlanjut sampai sekarang. Putaran terakhir direncanakan untuk 3–12 Juli 2014. TPP ini adalah sasaran utama agenda perdagangan pemerintahan Presiden Obama. TPP bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi di antara anggota TPP, mendorong inovasi, pertumbuhan ekonomi dan mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mempertahankannya. Hal ini terlihat jelas dari pernyataan ini:

*TPP will provide new market access for Made-in-American goods and services, strong and enforceable labor standards and environmental commitments, groundbreaking new rules on state-owned enterprises, a robust and balanced intellectual property rights framework, and a thriving digital economy. It will also include commitments that will improve the transparency and consistency of the regulatory environment to make it easier for small- and medium-sized business to operate across the region. By opening these new markets to American products, TPP will help insure that we are not left behind by our competitors in a vital region of the world.*²²

Sikap yang menganggap bahwa KEA merupakan ajang latihan bagi menghadapi persaingan yang lebih ketat di masa depan terletak dalam sifat dan bentuk KEA itu

²¹“Regional Comprehensive Economic Partnership Negotiations”, <http://www.dfat.gov.au/fta/rcep/>, diunduh pada 10 Juli 2014.

²²“Office of the United States Trade Representative”, *Executive Office of the President*, <http://www.ustr.gov/tpp>, diunduh pada 10 Juli 2014.

sendiri. Pembentukan suatu pasar tunggal di ASEAN dilakukan tanpa melalui pembentukan uni pabean terlebih dahulu; ia bergerak dari wilayah perdagangan bebas langsung ke pasar tunggal. Kendatipun KEA mulai integrasinya melalui 12 sektor prioritas, tetapi kedaulatan nasional tetap dicoba untuk dipertahankan dalam upaya integrasi ekonomi negara-negara ASEAN.

Dengan demikian, KEA lebih dimaksudkan untuk memperkuat ekonomi-ekonomi nasional, sehingga bentuk integrasi pasar regional lebih menekankan penguatan ekonomi-ekonomi nasional dan *only by implication* ekonomi regional, bukan sebaliknya seperti halnya di Uni Eropa. Itu sebabnya beberapa negara ASEAN ikut memprakarsai pembentukan TPP, tanpa membahasnya terlebih dahulu dalam forum ASEAN. RCEP merupakan suatu inisiatif ASEAN.

Kesimpulan

Tujuan akhir KEA adalah pembentukan pasar dan pangkalan produksi tunggal dengan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terlatih. Secara umum pemerintah pusat dan daerah masih menghadapi banyak persoalan dalam upaya ini, khususnya pembangunan infrastruktur. Demikian halnya dengan sosialisasi INPRES Pelaksanaan Kebijakan Komitmen Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN dengan berbagai program dan komitmen pemerintah. Pemerintah juga harus mempersiapkan sumber daya manusia terlatih dan berdaya saing dengan memastikan pembangunan ekonomi linier dengan pembangunan manusia. Permasalahan yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana perwujudan Komunitas Ekonomi ASEAN ini diselaraskan dengan Indonesia Vision 2025 dengan pembangunan koridor ekonomi yang didasarkan pada potensi setiap wilayah di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Das, Sanchita Basu et. al. 2013. *The ASEAN Economic Community: A Work in Progress*. Singapore: Asian Development Bank & Institute of Southeast Asian Studies.
- Mugijayani, Widdi & Pratiwi Kartika. 2012. "Perspective of the Indonesian Business Sector on the Regional Integration Process," dalam Sanchita Basu Das, (ed.). *Achieving ASEAN Economic Community 2015. Challenges for Member Countries & Business*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.

Jurnal

- Verbiest, Dr. Jean-Pierre. 2015. "ASEAN 2030: Aspirations, Enjeux et Politique". *Colloque CERI*, Paris. 16 November.

Website

- "ASEAN Finally Surpasses China In Foreign Direct Investment", 5 Maret 2014, dalam <http://www.cfoinnovation.com/story/7951/asean-finally-surpasses-china-foreign-direct-investment>, diunduh pada 5 Agustus 2014.
- "ASEAN Economic Community 2015: Peluang Atau Tantangan Bagi Tenaga Kerja Indonesia", dalam <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/berita-aec.pdf>, diunduh pada 5 Agustus 2014.
- ASEAN Secretariat, <http://www.asean.org/asean/asean-secretariat>.
- Balisacan, Arsenio M, "ASEAN Economic Integration 2015: A Window to Global Competitiveness", Republic of the Philippines, National Economic and Development Authority, dalam http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27-Maret-2014-TSIS-draft_MD_PRD.pdf, diunduh pada 5 Agustus 2014.
- Das, Sanchita Basu, "A critical look at the ASEAN Economic Community Scorecard", 1 Juni 2012, East Asia Forum <http://www.eastasiaforum.org/2012/06/01/a-critical-look-at-the-asean-economic-community-scorecard/>, diunduh pada 5 Agustus 2014.
- http://web.pism.org/wp-content/uploads/2014/04/AEC-2015-A-Window-to-Global-Competitiveness-27-March-2014-TSIS-draft_MD_PRD.pdf .
- <http://www.weforum.org/issues/travel-and-tourism-competitiveness>.
- "Office of the United States Trade Representative", *Executive Office of the President*, Juli 2014, <http://www.ustr.gov/tpp>.
- "Regional Comprehensive Economic Partnership Negotiations", <http://www.dfat.gov.au/fta/rcep/>.
- Song, Sophie, "Southeast Asia Receives More Foreign Direct Investment (FDI) Than China, Which Is Now The World's Third-Largest Foreign Investor", 5 Maret 2014, dalam <http://www.ibtimes.com/southeast-asia-receives-more-foreign-direct-investment-fdi-china-which-now-worlds-third-largest>, diunduh pada 5 Agustus 2014.
- Saputra, Wempi & Ari Cahyo Trilaksana, "Toward ASEAN Economic Community: Revitalising Indonesia's Position in Financial and Customs Cooperation, Center for Policy Analysis and Harmonization", Ministry of Finance, Republic of Indonesia, dalam https://www.conftool.com/irsa2014/index.php/Saputra-Towards_ASEAN_Economic_Community190.pdf?page=downloadPaper&filename=Saputra-

Towards_ASEAN_Economic_Community_190.pdf&form_id=190&form_version=final,
diunduh pada 5 Agustus 2014.

“The ASEAN Economic Community: The Status of Implementation, Challenges and Bottlenecks”,
CIMB ASEAN Research Institute, Juni 2013.

Mahendrawathi ER, Anisah Herdiyanti dan Hanim Maria Astuti, “Readiness of Indonesian
Companies for ASEAN Economic Community (AEC) - Preliminary Findings from Automotive
and Garment Industry”, *Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial
Engineering and Operations Management*, Bali, Indonesia, 7 – 9 Januari 2014, dalam
<http://iieom.org/ieom2014/pdfs/460.pdf>, diunduh pada 4 Agustus 2014.

